



Pemilu dan COVID-19

Makalah Teknis International IDEA 1/2020

Penyebaran COVID-19 (penyakit virus corona baru) yang mendunia telah sangat berdampak pada penyampaian layanan publik maupun peristiwa-peristiwa rutin yang merupakan bagian integral dari masyarakat yang inklusif. Proses pemilu merupakan salah satu peristiwa yang dimaksud.

Peluang bagi masyarakat untuk memastikan para pejabat berada dalam jabatan terpilih atau mengganti mereka, dalam suatu kerangka waktu yang ditentukan secara konstitusional, merupakan pilar nilai-nilai dan standar demokrasi. Proses melakukan hal ini dilakukan secara komunal, dan peristiwa-peristiwa komunal pada hakikatnya mengumpulkan orang-orang – suatu proses yang bertentangan dengan saran untuk membatasi penularan virus, sebagaimana yang menyebabkan COVID-19.

Keputusan harus diambil untuk memastikan lembaga-lembaga demokrasi berfungsi sebagaimana biasanya, selama masa luar biasa, seperti merebaknya pandemi kesehatan global. Makalah Teknis ini menawarkan suatu ikhtisar awal tentang poin-poin kunci bagi penyelenggara pemilu, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil mengenai penyelenggaraan pemilu di tengah berlanjutnya penyebaran COVID-19.

Pendahuluan

Penyebaran penyakit menular seperti COVID-19, dan upaya-upaya untuk mencegah virus tersebut yang dikenakan oleh pemerintah dan lembaga negara, memiliki dampak baik konstitusional maupun teknis bagi waktu dan penyelenggaraan pemilu.

Proses pemilu yang diselenggarakan dalam keadaan normal membawa tingkat risiko tertentu bagi pemilih maupun petugas pemungutan suara. Selama masa-masa yang luar biasa, seperti menanggapi pandemi yang baru dan asing, pedoman yang diterbitkan oleh otoritas kesehatan publik mengenai pergerakan orang harus menjadi pertimbangan dari keputusan yang diambil oleh pemerintah dan Badan Penyelenggara Pemilu (BPP) baik untuk menunda atau menyelenggarakan pemilu. Pertimbangan juga harus diberikan untuk penyelenggaraan kegiatan yang aman di seluruh siklus penyelenggaraan pemilu (pendaftaran pemilih, rekrutmen dan pelatihan petugas, pencalonan, kampanye politik, pengadaan dan penyelesaian perselisihan pemilu).

Pembatasan yang dikenakan terhadap pergerakan bebas akan secara alamiah mempengaruhi proses pemilu. Pedoman kesehatan dan keselamatan yang diperbaharui dapat dimasukkan ke dalam pengaturan pemilu untuk

melindungi petugas pemilu dan pemilih, namun sejauh mana hal itu dimungkinkan tergantung pada sumber daya keuangan KPU dan waktu antara pengenalan kebiasaan kesehatan dan keselamatan yang baru dengan pemilu.

Badan Penyelenggara Pemilu harus mengidentifikasi dan menilai kelayakan pelaksanaan setiap persyaratan baru tanpa mengkompromikan integritas atau legitimasi pemilu. Kerja sama dengan berbagai lembaga negara harus dilakukan dan hasil konsultasi harus menginformasikan setiap keputusan yang diambil. Keputusan harus menyeimbangkan risiko menyelenggarakan pemilu melalui pemungutan suara secara langsung di tempat pemungutan suara dengan potensi implikasi kesehatan mengumpulkan orang di ruang terbatas, terhadap metode pemungutan suara alternatif, dan dampak penundaan pemilu yang akan terjadi terhadap standar demokrasi. Pengaturan logistik yang baru dan tidak diujicobakan akan menimbulkan tantangan tambahan terhadap pengaturan yang ada, seperti mandat BPP yang kadaluwarsa, prosedur baru tidak sesuai dengan peraturan atau kontrak dengan vendor yang ada, atau anggaran yang dialokasikan ditarik.

Pemilihan legislatif diselenggarakan selama epidemi Ebola di Liberia pada 2014, dengan beberapa daerah perkotaan dikecualikan partisipasinya. Demikian pula, negara-negara yang terdampak konflik, seperti Pakistan pada 2018, belum menyelenggarakan pemilu di daerah-daerah tertentu karena ketidakamanan. Pada bulan Maret 2020, Italia, Spanyol dan kemudian Prancis membatasi pergerakan warga negaranya sebagai akibat pandemi COVID-19. Pemilu daerah di Prancis diselenggarakan, namun dengan partisipasi pemilih yang jauh lebih rendah daripada yang diperkirakan atau dalam pemilu sebelumnya, sedangkan referendum mengenai reformasi konstitusi di Italia ditunda tanpa batas waktu.

Pertimbangan Utama dalam Merencanakan Pemilu

Signifikansi Konstitusionalitas Pemilu

Pemilu diselenggarakan di tingkat nasional, subnasional dan supranasional. Beberapa pemilu penting baik secara konstitusi maupun politik, berfungsi sebagai ‘mekanisme’ dalam urutan peristiwa, seperti sebuah langkah dalam suatu proses perdamaian atau suatu proses reformasi hukum atau dalam mengamankan anggaran nasional. Beberapa pemilu mengharuskan ambang batas partisipasi pemilih yang harus dicapai. Untuk pemilu daerah, beberapa daerah di suatu negara mungkin tidak serentan ancaman kesehatan publiknya sebagaimana di daerah lainnya, sehingga lebih kecil kemungkinannya mengalami dampak COVID-19.

Mekanisme Kampanye Alternatif

Kampanye rapat umum, kampanye dari pintu ke pintu atau pertemuan-pertemuan di balai kota merupakan bagian penting dari demokrasi yang bersemangat dan inklusif. Akan tetapi, kampanye pemilu semakin banyak dilakukan di internet atau melalui platform media sosial. Media ini menawarkan pilihan alternatif ketika pemilih dan kontestan politik dibatasi gerakannya atau diharuskan menjaga jarak fisik tertentu antara satu sama lain.

Metode Pemungutan Suara Jarak Jauh Alternatif

Pengaturan pemungutan suara khusus yang memungkinkan warga negara memberikan suara dari jarak jauh (yaitu tidak secara langsung di tempat pemungutan suara) – melalui pos, atau daring melalui komputer atau aplikasi telepon seluler – dapat mengurangi bahaya kesehatan atau keamanan yang ditimbulkan oleh pemungutan suara langsung. Akan tetapi, biaya dapat menjadi penghalang, kerangka waktu pelaksanaan mungkin tidak cukup untuk persiapan, pengadaan dan

pelatihan yang memadai, dan kerangka hukum mungkin melarang penerapannya. Ketidakpercayaan politik juga dapat merusak kepercayaan terhadap alternatif apapun, sementara kemungkinan ancaman terhadap integritas pemilu dapat merusak kelayakan pilihan pemungutan suara alternatif.

Pengaturan pemungutan suara jarak jauh yang ada dirancang untuk melengkapi, bukan mengganti, pemungutan suara langsung di tempat pemungutan suara. Metode pemberian suara jarak jauh sebagian besar tidak terkontrol dan, dalam beberapa konteks, diketahui merusak integritas pemilu. Dari sudut manajemen pemilu, pemberian suara di tempat pemungutan suara optimal dalam menjaga integritas pemilu. Hal ini mengurangi peluang penyimpangan, seperti pembelian suara dan pemaksaan atau pilihan keluarga, sambil menjamin kerahasiaan dan integritas pemilu. Pemberian suara di tempat pemungutan suara lebih jauh dapat melindungi dan memperkuat nilai sosial partisipasi politik yang diberikan oleh pemilih.

Pemungutan suara melalui pos biasanya membutuhkan upaya logistik berskala besar, dari pengadaan layanan pos yang dapat diandalkan hingga merekrut staf penghitung surat suara, dan memerlukan banyak petugas penghitung untuk bekerja sama di bawah pengawasan yang ketat. Pelaksanaan seperti itu juga menantang untuk dilakukan dengan aman selama pandemi virus, seperti COVID-19.

Pemilu yang diselenggarakan di sebuah daerah dalam suatu negara dengan jumlah penduduk lebih banyak dengan risiko kesehatan yang meningkat, seperti orang tua, pemberian suara jarak jauh dapat menjadi pilihan yang efektif untuk mendorong partisipasi mereka dan mempertahankan angka partisipasi, sambil membatasi penularan dan melindungi kesehatan warga negara dan petugas pemungutan suara. Pemungutan suara jarak jauh dalam kerangka hukum yang jelas dapat menawarkan pilihan lebih lanjut bagi orang-orang tua dan kelompok rentan untuk berpartisipasi dalam pemilu tanpa diharuskan mengunjungi tempat pemungutan suara.

Pemilih perlu diberitahu mengenai apapun metode pemungutan suara baru yang telah diambil. Selama periode di mana gerakan warga negara dibatasi, seperti dalam menanggapi COVID-19 di beberapa negara, kampanye media harus dirancang untuk menjangkau pemilih melalui sarana komunikasi yang paling banyak digunakan oleh warga negara yang dibatasi keluar rumah. Hal ini termasuk saluran-saluran tradisional, seperti TV

dan radio nasional, juga internet dan platform media sosial.

Studi kasus: Selandia Baru mempertimbangkan metode pemungutan suara alternatif sebelum pemilihan umum dan dua referendum nasional

Komisi Pemilihan Umum Selandia Baru tengah mempertimbangkan untuk memperluas pengaturan pemungutan suara alternatif yang ada, yang didesain untuk pemilih yang tidak dapat datang ke tempat pemungutan suara untuk memberikan suara secara langsung, untuk seluruh pemilih bagi pemilihan umum yang dijadwalkan pada 19 September 2020. Pengaturan pemungutan suara alternatif yang dipertimbangkan adalah memperluas layanan daring untuk pemungutan suara yang sekarang ini ditawarkan bagi pemilih di luar negeri, yang dapat mengunduh dan mengunggah surat suara mereka, memperluas layanan pemungutan suara dengan pendiktean via telepon, yang tersedia bagi penyandang tuna netra, tuna netra sebagian atau memiliki disabilitas fisik (meskipun metode ini tidak memungkinkan pemilih memberikan suara tanpa bantuan); menawarkan pemungutan suara jarak jauh dan melalui pos, yang saat ini tidak diatur dalam undang-undang pemilu; dan memperluas penggunaan kotak suara bergerak.

Sumber: Vote NZ [Selandia Baru Memilih]: Situs Komisi Pemilihan Umum Selandia Baru

Akankah Menunda atau Melanjutkan Penyelenggaraan Pemilu Mempengaruhi Legitimasinya?

Jenis dan signifikansi konstitusionalitas pemilu, serta tanggal semula yang dijadwalkan, akan menjadi faktor dalam keputusan untuk menunda atau terus menyelenggarakan pemilu. Keuntungan dan kerugian dari penundaan juga perlu dibandingkan dengan kelebihan dan kekurangan dari melanjutkan, karena menyelenggarakan pemilu juga dapat melihat berkurangnya legitimasi.

Hilangnya Suara

Pemilu merupakan kesempatan bagi warga negara untuk menghapus dan mengganti seorang wakil atau pemerintahan. Kesempatan ini hilang untuk jangka waktu tertentu jika pemilu ditunda.

Tuntutan Oportunisme Politik

Penundaan dapat – dan idealnya seharusnya – disetujui melalui konsensus seluruh partai politik. Risiko bahwa pemerintah petahana dapat bertindak secara sepihak untuk keuntungan politik, atau setidaknya dianggap sebagai keuntungan politik, seharusnya dipertimbangkan,

untuk menghindari melemahnya kepercayaan dalam proses dan legitimasi hasilnya.

Akibat pada Partisipasi Pemilih

Pemilu demokratis, yang terbaik, dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi dan tingkat partisipasi yang setara di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Tanpa hal ini, hasil pemilu dapat ditentukan oleh beberapa kelompok saja dibandingkan dengan yang lainnya. Menyelenggarakan pemilu selama pandemi dapat merusak atau dianggap dapat merusak, aspek demokrasi ini dengan mengurangi angka partisipasi. Warga negara lebih kecil kemungkinannya untuk memilih jika mereka memperhatikan kesehatan mereka dan kesehatan anggota keluarganya. Oleh karena itu, legitimasi kontestasi dapat dirusak dengan partisipasi yang tidak merata. Mereka dengan kondisi kesehatan mendasar yang lebih mudah terdampak oleh COVID-19 mungkin lebih kecil kemungkinannya untuk memilih. Melanjutkan pemilu karenanya menjadikan proses elektoral menjadi kurang inklusif (James dan Garnett 2020).

Dampak terhadap Perdebatan Politik

Pemilihan umum yang demokratis seharusnya menampilkan kampanye politik yang luas dan debat publik yang luas terhadap isu-isu kebijakan publik, yang dapat dikurangi jika warga negara dibatasi untuk bergerak dengan bebas. Terlebih lagi, setiap kampanye pemilu mungkin akan didominasi oleh pandemi yang sedang berlangsung, menghambat terjadinya diskusi yang komprehensif tentang isu kebijakan publik yang lebih luas.

Studi Kasus: Chile menunda referendum konstitusi selama enam bulan

Chile telah menetapkan referendum nasional mengenai apakah ya atau tidak untuk merancang konstitusi baru pada 26 April 2020. Pada 19 Maret 2020, setelah kesepakatan politik yang luas di antara 15 partai politik, hal ini dijadwal ulang untuk 25 Oktober 2020. Keputusan muncul setelah Sebastián Piñera, Presiden Chile, menyatakan 90 hari keadaan bencana di negara itu, dengan tujuan memperkuat kemampuan negara untuk mengendalikan virus. Ini merupakan keputusan penting, terutama karena tuntutan untuk konstitusi baru telah menjadi jantung dari protes berskala besar yang melanda negara itu sejak Oktober 2019. Untuk memberlakukan tanggal baru pelaksanaan referendum ini, rancangan undang-undang reformasi konstitusional diajukan dan memerlukan persetujuan dua per tiga anggota parlemen.

Sumber: McGowan 2020.

Apakah menunda pemilu itu konstitusional?

Banyak konstitusi menetapkan penundaan pemilu selama keadaan darurat. Menyelenggarakan pemilu selama keadaan darurat bisa sulit. Menyelenggarakan pemilu selama keadaan darurat dapat mengalihkan sumber daya dari pekerjaan menyelamatkan kehidupan yang lebih mendesak. Terdapat juga risiko bahwa pemerintah yang tidak bermoral dapat menggunakan pembatasan darurat pada hak-hak (misalnya kekuasaan penahanan administratif) untuk menekan calon-calon oposisi atau media yang kritis, yang dapat membuat pemilu yang diselenggarakan dalam keadaan darurat menjadi kurang bebas dan adil daripada yang seharusnya. Kemungkinan lain, menunda pemilu dapat dipisahkan dari pernyataan keadaan darurat, menjadikannya mungkin untuk menyatakan keadaan darurat tanpa menunda pemilu, atau untuk menunda pemilu tanpa perlu menyatakan keadaan darurat.

Beberapa konstitusi melarang pengesahan amandemen konstitusi selama keadaan darurat. Alasan di balik ini ada empat: (a) selama keadaan darurat, keputusan tergesa-gesa dapat dibuat untuk mengatasi ketakutan dan kekhawatiran saat ini namun mengabaikan kepentingan jangka panjang dengan cara yang pada akhirnya mungkin membahayakan demokrasi; (b) peningkatan kekuasaan eksekutif dan pembatasan hak-hak selama keadaan darurat dapat mempermudah pemerintah untuk secara tidak adil mempengaruhi proses amandemen; (c) proses amandemen kadang-kadang memerlukan pemilihan umum atau referendum yang mengintervensi yang memungkinkan rakyat menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan atas perubahan konstitusi, dan hal ini mungkin sulit diatur selama keadaan darurat; dan (d) mencegah ketentuan konstitusi yang mengatur keadaan darurat (dalam hal dampak, jangka waktu dan perlindungannya) agar tidak berubah ketika keadaan darurat diberlakukan, sehingga mencegah perubahan yang dapat memperpanjang keadaan darurat atau membuka cara untuk penyalahgunaan kekuasaan. (Bulmer 2018: 27, 31)

Studi Kasus: Bavaria, sebuah negara bagian Jerman, menyelenggarakan pemungutan suara pos untuk putaran kedua pemilu daerah

Bavaria menyelenggarakan putaran pertama pemilu daerah pada 16 Maret 2020, menawarkan pemungutan suara langsung di tempat pemungutan suara dan melalui pos. Pemilu putaran kedua, yang akan diadakan pada 29 Maret 2020, seluruhnya pemungutan suara melalui pos. Hal itu diputuskan sebagai tanggapan terhadap pandemi COVID-19 dan risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh penularan melalui kontak sosial. Keputusan dan pengaturan logistik dilakukan setelah putaran pertama diadakan.

Sumber: Süddeutsche Zeitung 2020.

Pedoman untuk Mengoperasikan Tempat Pemungutan Suara Selama Pandemi COVID-19

Tindakan bagi petugas pemilu sebelum hari pemungutan suara:

- Pemilih harus ditawarkan metode pemungutan suara yang meminimalisasi kontak langsung dengan orang lain dan mengurangi ukuran kerumunan di tempat pemungutan suara.
- Pemungutan suara melalui pos harus didorong jika diizinkan dalam yurisdiksinya.
- Pemungutan suara yang diselenggarakan lebih awal harus didorong, untuk mengurangi kerumunan sepanjang hari.
- Pemilih yang merencanakan memberikan suara secara langsung pada hari pemungutan suara harus didorong untuk tiba pada waktu yang tidak sibuk.

Tindakan Pencegahan yang dapat Dilakukan oleh Petugas TPS bagi Dirinya Sendiri dan Pemilih:

- Mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air selama sekurang-kurangnya 20 detik. Jika sabun dan air tidak tersedia, gunakan pembersih tangan berbasis alkohol yang mengandung setidaknya 60 persen alkohol. Tampilkan instruksi dengan jelas di dalam tempat pemungutan suara.
- Hindari penanganan dokumen identifikasi pemilih yang tidak perlu.
- Masukkan strategi penjarakan sosial, jika memungkinkan: lebih dari 1,5 meter di antara pemilih, dan jumlah pemilih dibatasi untuk memasuki tempat pemungutan suara pada saat yang bersamaan.

- Sediakan pembersih tangan berbasis alkohol setidaknya 60% alkohol untuk digunakan sebelum dan setelah menggunakan pensil, mesin pemungutan suara atau langkah akhir dalam proses pemungutan suara. Pertimbangkan untuk meletakkan pembersih tangan. Berbasis alkohol di tempat-tempat yang terlihat dan sering digunakan seperti meja pendaftaran dan pintu keluar.
- Secara rutin bersihkan permukaan yang sering disentuh dengan semprotan pembersih rumah tangga, termasuk meja, gagang pintu, sakelar, pegangan, meja, toilet, keran dan bak cuci.
- Bersihkan dan disinfeksi peralatan terkait pemungutan suara secara rutin, seperti pensil, mesin pemungutan suara, laptop, tablet dan papan ketik.
- Pertimbangan logistik untuk pengaturan pemungutan suara alternatif;
- Jika melanjutkan pemilu, proses-proses untuk mengurangi risiko;
- Jika menunda pemilu, jalur untuk mengatasi masalah pemilu ada di tangan dan tersedianya pedoman yang ketat untuk pengaturan pejabat sementara; dan
- Komunikasi publik mengenai isu-isu yang dipertaruhkan, alasan keputusan dan proses yang dilakukan untuk menjaga demokrasi.

Daftar Pustaka

Memutuskan Menunda atau Melanjutkan Penyelenggaraan Pemilu

Melanjutkan pemilu atau menunda pemilu memiliki risiko bagi pemerintah, BPP dan otoritas kesehatan. Ketika menunda pemilu mungkin menjadi pilihan yang paling layak dan bertanggung jawab dari sudut pandang kesehatan publik, keputusan tersebut dapat menyebabkan risiko lain terwujud, misalnya:

- Risiko reputasi (untuk organisasi yang membuat keputusan, untuk kepercayaan terhadap proses dan lembaga demokrasi, untuk hubungan internasional);
- Risiko politik (mengganggu tingkat lapangan permainan dan merusak petahana atau oposisi);
- Risiko keuangan (implikasi anggaran, misalnya uang yang diinvestasikan tidak dapat dipulihkan);
- Risiko operasional (tanggal pengganti tidak layak karena risiko lainnya, misalnya musim hujan, musim dingin, peristiwa lainnya); dan
- Risiko hukum (keputusan dapat digugat secara hukum).

Rekomendasi

Konsultasi antar lembaga dan mekanisme komunikasi harus dicari dan mencakup baik penyelenggara pemilu maupun otoritas kesehatan masyarakat. International IDEA merekomendasikan:

- Pertimbangan hati-hati atas keselamatan petugas dan keselamatan public dan petugas, kendala dan prosedur konstitusional, serta implikasinya terhadap demokrasi—inklusi, kesetaraan dan akuntabilitas;

Bulmer, E. W., *Emergency Powers [Kekuatan Darurat]*, International IDEA Constitution-Building Primer No. 18, (Stockholm: International IDEA, 2018), <<https://www.idea.int/publications/catalogue/emergency-powers>>, diakses 25 Maret 2020

Centers for Disease Control and Prevention (CDC), *Recommendations for Election Polling Locations [Rekomendasi untuk Lokasi Tempat Pemungutan Suara]*, <<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/election-polling-locations.html>>, diakses 25 Maret 2020

James, T. S. and Garnett H. A., 'Introduction: the case for inclusive voting practices' [Pendahuluan: kasus untuk praktik pemungutan suara inklusif], *Policy Studies*, 41:2–3 (2020), pp. 113–30, <<https://doi.org/10.1080/01442872.2019.1694657>>

McGowan, C., 'Chile moves to postpone constitutional referendum amid coronavirus crisis'[Chili bergerak untuk menunda referendum konstitusi di tengah krisis virus corona], *The Guardian*, 19 March 2020, <<https://www.theguardian.com/world/2020/mar/19/chile-postpone-constitutional-referendum-coronavirus-crisis>>, diakses 25 Maret 2020

Süddeutsche Zeitung, 'Das landesweite Ergebnis liegt vor' [Hasil seluruh negara bagian tersedia], 20 Maret 2020, <<https://www.sueddeutsche.de/bayern/kommunalwahl-2020-bayern-newsblog-1.4841066>>, diakses 25 Maret 2020

Vote NZ: New Zealand Electoral Commission website, *COVID-19 and the 2020 General Election [SB Memilih: Situs Komisi Pemilihan Umum Selandia Baru, COVID-19 dan Pemilihan Umum 2020]*, <<https://vote.nz/elections-and-more/all-events/2020/2020-general-election/covid-19-and-the-2020-general-election/>>, diakses 25 Maret 2020

Edisi Bahasa Inggris: © 2020 International Institute for Democracy and Electoral Assistance
Terjemahan Bahasa Indonesia: © 2020 Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi dan International Institute for Democracy and Electoral Assistance

Publikasi International IDEA bersifat independen dari kepentingan negara atau politik tertentu. Pandangan-pandangan yang dikemukakan dalam publikasi ini tidak selalu mewakili pandangan International IDEA, ataupun pandangan anggota Dewannya.

Publikasi ini adalah terjemahan dari versi Bahasa Inggris International IDEA's "Elections and COVID-19: Technical Paper 1/2020".

Keakuratan naskah yang diterjemahkan belum diverifikasi oleh International IDEA. Dalam hal terjadi keraguan, yang berlaku adalah versi asli bahasa Inggris. Penerjemahan ini dilakukan oleh Perludem.

Versi elektronik dari publikasi ini tersedia di bawah izin Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 (CC BY-NC-SA 3.0). Anda bebas menyalin, mendistribusikan dan mentransmisikan publikasi, dan untuk mencampur dan menyesuainya, asalkan hanya untuk tujuan-tujuan non-komersial, bahwa anda menggunakan atribut publikasi dengan tepat dan bahwa anda mendistribusikannya di bawah izin yang sama

Untuk informasi lebih lanjut kunjungi situs Creative Commons: <<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>>

Desain dan layout: International IDEA

DOI: <<https://doi.org/10.31752/idea.2020.16>>

Tentang International IDEA

Didirikan pada 1995, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) merupakan organisasi antarpemerintah yang mendukung demokrasi yang berkelanjutan di seluruh dunia. Lembaga ini adalah satu-satunya organisasi antarpemerintah dengan mandat global yang hanya berfokus pada demokrasi dan pemilihan umum, dan berkomitmen untuk menjadi penentu agenda global dalam bidang pembangunan demokrasi. Dengan 33 negara anggota dari semua benua, International IDEA mendukung pengembangan institusi dan proses demokrasi yang lebih kuat; dan memupuk demokrasi yang berkelanjutan, efektif dan sah melalui penyediaan sumber daya pengetahuan komparatif, dialog dan kemitraan di tingkat global, regional dan negara.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance
Strömsborg, SE-103 34 Stockholm, SWEDEN
Tel: +46 8 698 37 00
E-mail: info@idea.int
Website: <<https://www.idea.int>>



Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
Jakarta, INDONESIA
Tel: +62 21 8300004
E-mail: admin@perludem.org
Situs: www.perludem.org



Makalah Teknis ini dimutakhirkan pada 26 Maret 2020